KONTRIBUSI MUATAN LOKAL DAN MAGANG UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA

oleh

DR. H. NURTAIN

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL : 27-12-2001
SUMBER/HARGA : Hadiah
KOLEKSI : K
NO. INDUK : 719/K/2001-K1/2
KLASIFIKASI : 371.38 NUR-K

MAKALAH

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Disampaikan Dalam Seminar Lokakarya Perkembangan
Pendidikan Selama 50 Tahun Indonesia Merdeka
Dan Kecenderungan dalam PJP II Yang
Diadakan Oleh ISPI Pusat Jakarta
Tanggal 16-19 Mei 1995

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

KONTRIBUSI MUATAN LOKAL DAN MAGANG UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA

DR. H. NURTAIN*

PENGANTAR

Judul makalah ini diangkat dari salah satu bahan dalam Seminar Lokakarya Perkembangan Pendidikan Selama 50 Tahun Indonesia Merdeka dan kecenderungannya dalam PJP II yang diminta Pengurus Pusat ISPI untuk dibahas dalam Seminar Lokakarya tersebut di atas pada tanggal 16 s.d. 19 Mei 1995. Judul itu dipilih karena berkaitan dengan inovasi pendidikan yang sedang digalakkan di Indonesia dewasa ini, terutama yang bertalian dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) dunia pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.

Menyimak dan mendalami tema Seminar Lokakarya (SEMILOKA) yang diketengahkan itu, tampaknya kita perlu mempertanyakan atau paling sedikit meninjau agak sejenak, apakah benar kurikulum muatan lokal dan praktek magang memberi kontribusi pada usaha mencerdaskan dan meningkatkan kemandirian bangsa? Pertanyaan ini memang wajar dan perlu diberi jawaban. Namun untuk menjawab pertanyaan ini secara akurat harus melalui penelitian yang dirancang khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan praktek magang ini.

Dalam makalah ini jawaban terhadap pertanyaan di atas akan ditelusuri dengan argumen yaitu :

(1) apakah penyusunan kurikulum muatan lokal sudah mengikuti teori yang berlaku;

(2) lalu bandingkan mekanisme penyusunan yang dipraktekkan dengan teori yang dipakai;

(3) apakah praktek magang itu menimbulkan kemandirian pribadi dalam berusaha.

Secara teoretis, bila ada kesepadanan antara teori penyusunan dengan mekanisme penyusunan yang digunakan, maka kurikulum muatan lokal itu secara prosedural dan substansial telah dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya setelah

---

* Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Staf pengajar Program Pasca Sarjana IKIP Padang.

praktek magang dalam dunia industri siswa dapat diterima dalam industri dan atau dapat berusaha sendiri, maka praktek magang tersebut telah dapat menciptakan kemandirian.

1. PROSES PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kurikulum untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Kepmendikbud RI No. 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 dan kurikulum Pendidikan Menengah ditetapkan dengan Kepmendikbud RI No. 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993. Landasan penetapan kurikulum tersebut adalah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989.

a. Kurikulum Menurut USPN-RI No. 2/1989

Kurikulum menurut undang-undang ini ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (UU-RI No. 2 Tahun 1989 : 3). Dalam penyusunan kurikulum tersebut selalu memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Selanjutnya dalam Bab IX pasal 38 dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaanm serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan (UU-RI No. 2 Tahun 1989 : 16). Berdasarkan kutipan di atas, ternyata kurikulum pendidikan dasar terdiri dari muatan nasional dan muatan lokal. Proporsi kurikulum muatan nasional 80% dan kurikulum muatan lokal 20%. Secara grafis dapat digambarkan dalam skema 1.

Kurikulum Pendidikan Dasar yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan kurikulum pendidikan dasar yang bersifat lokal ditetapkan oleh Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat (Kepmen No. 060/U/93 : 2).

Kurikulum

Muatan Nasional 80%	Muatan Lokal 20%

Skema 1. Komposisi Kurikulum Muatan Nasional dan Lokal

b. Pengertian Muatan Lokal

Apakah yang dimaksud dengan muatan lokal? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditelusuri kembali idea timbulnya kurikulum muatan lokal. Kita menyadari bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri yang majemuk dalam lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, pola kehidupan dan kebutuhan pembangunan. Karena perbedaan ciri-ciri tersebut, maka terlalu riskan dalam penempatan lulusan untuk menjadi angkatan kerja, bila kurikulum sekolah diseragamkan untuk seluruh Indonesia. Menyadari masalah ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan muatan lokal pada kurikulum Sekolah Dasar sejak tahun 1987.

Pengertian muatan lokal menurut SK Mendikbud No. 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987 ialah : "Suatu program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa". (Pusbangkurandik, 1989:3). Dengan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa apa saja isi bahan dan media penyampaiannya yang mendukung pengembangan dan pelestarian lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan kebutuhan pembangunan suatu daerah perlu diajarkan kepada siswa. Jadi seandainya lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan kebutuhan pembangunan suatu daerah telah menuntut salah satu atau lebih keterampilan-keterampilan seperti : pertanian, perawatan radio dan TV, kerajinan anyaman, montir motor dan mobil dan bahkan komputer misalnya, maka isi bahan muatan lokal yang diberikan harus sesuai dengan salah satu atau lebih tuntutan keterampilan di daerah tersebut.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa muatan lokal tidak hanya program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan kebutuhan pembangunan suatu daerah, tetapi muatan lokal itu jauh lebih fleksibel dan luas lagi, yaitu muatan lokal yang isi bahannya mutakhir dan media penyampaiannya moderen serta berkualitas tinggi. Jenis kurikulum muatan lokal seperti inilah yang dituntut oleh kurikulum baru tahun 1994.

Perbedaan kurikulum muatan lokal dalam kurikulum tahun 1984 dengan kurikulum tahun 1994, dapat dilihat dalam Daftar 1. Perbedaannya paling tidak menyangkut empat aspek yaitu : prosedur pengembangan, personalia tim pengembang, waktu untuk penyajian dan sistem pengukuhannya.

c. *Teori Pengembangan Kurikulum*

Kurikulum muatan nasional dikembangkan di tingkat nasional oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbangdikbud yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum itu.

Oleh sebab itu kurikulum muatan nasional dianggap tidak bermasalah karena sudah disusun oleh badan yang berwenang di tingkat nasional.

Yang menjadi pertanyaan ialah apakah perencanaan dan penyusunan kurikulum muatan lokal sudah dilakukan sesuai dengan teori dan prosedur penyusunan kurikulum yang berlaku? Secara konseptual prosedur perencanaan kurikulum dapat digambarkan dalam skema 2.

Pada umumnya model perencanaan kurikulum seperti terlihat dalam skema 2 diikuti oleh sekolah-sekolah di USA dalam rangka memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan yang memperlihatkan suatu proses kerja sama dari tingkat pusat, daerah dan sekolah dengan melibatkan badan-badan luar dan anggota masyarakat sekolah lainnya.

Model Model lain dalam perencanaan dan penerapan suatu kurikulum baru dapat pula diperlihatkan dalam skema 3.

MUATAN LOKAL			
Kurikulum 1984		Kurikulum 1994	
1.	Prosedur pengembangan isi dan media penyampaian muatan lokal dipadukan dengan mata-mata pelajaran pada seluruh tingkat di SD.	1.	Prosedur pengembangan isi dan media penyampaian muatan lokal berdiri sendiri, seperti mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia.
2.	Penyusunannya dilakukan kepala sekolah bersama guru dan pejabat terkait di awal tahun ajaran dalam suatu lokakarya khusus untuk keperluan ini.	2.	Penyusunannya dilakukan oleh suatu Tim Perekayasa kurikulum yang khusus dibentuk untuk itu dibawah bimbingan Pusbangkurandik Balitbang Depdikbud.
3.	Dapat dipastikan tidak ada satu sekolah atau daerahpun yang mampu menyusun kurikulum muatan lokal terpadu dengan mata-mata pelajaran lain pada seluruh tingkat di SD.	3.	Hasil rekayasa kurikulum itu diseminarkan beberapa kali untuk memperoleh masukan yang diperlukan bagi perbaikan, sebelum dicetak menjadi kurikulum yang final.
4.	Tidak disediakan waktu yang khusus untuk menyajikan bahan muatan lokal kepada siswa, tetapi diselipkan pada mata pelajaran lain bila terdapat kaitan antara muatan lokal dengan mata pelajaran tersebut.	4.	Disediakan waktu khusus untuk menyajikan bahan muatan lokal yang telah disusun pada setiap tingkat di SD dan SMTP I II III IV V VI SD 2 2 4 5 7 7 SMTP 6 6 6

DAFTAR 1. PERBEDAAN MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM TAHUN 1984 DAN KURIKULUM TAHUN 1994

Dalam skema 3 jelas sekali bahwa dalam perekayasaan kurikulum terdapat kerjasama antara ahli berbagai disiplin, termasuk ahli dalam bidang industri dan bidang jasa, dengan ahli pendidikan, supervisor, administrator dan guru-guru di lapangan. Ahli disiplin ilmu, termasuk industri dan jasa memberikan substansi isi/bahan kepada kurikulum, karena mereka merupakan spesialis dalam bidang ilmu tertentu. Ahli pendidikan, terutama yang menyandang keahlian di bidang kurikulum memberikan kerangka disain, urutan pola pengembangan yang menata isi/bahan

menjadi bermakna bagi pengembangan sumber daya manusia. Demikian juga guru sebagai pemakai kurikulum memberikan umpan balik kepada supervisor dan

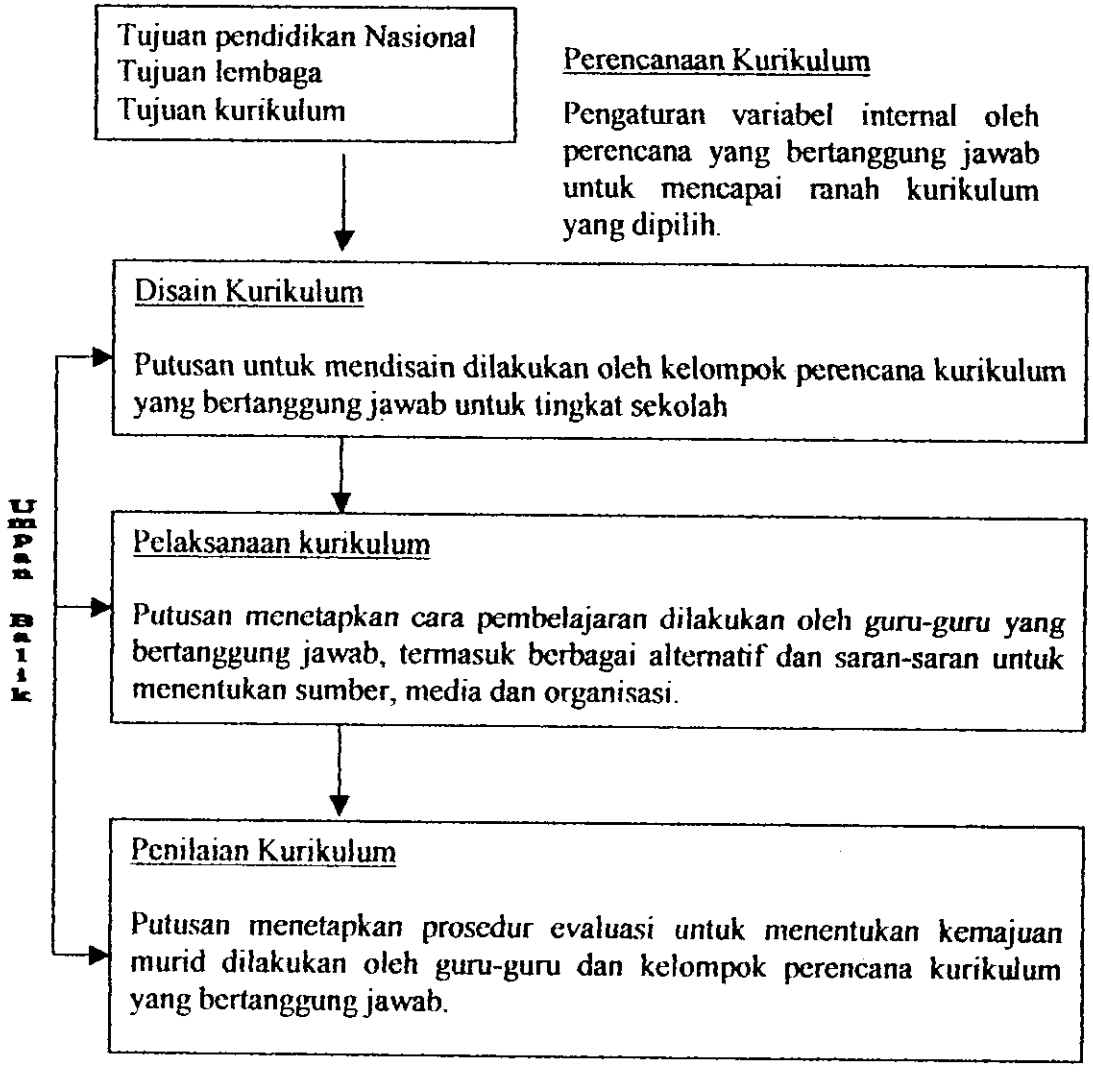

SKEMA 2. PROSES PERENCANAAN KURIKULUM
(Sumber : Adaptasi Saylor dan Alexander, 1974 : 26)

dan administrator. Pada tingkat SD dan SMTP, supervisor dan administrator pada umumnya dirangkap oleh kepala sekolah dan dalam periode tertentu memberikan bantuan kepada guru-guru.

Apabila model perencanaan kurikulum yang diperlihatkan dalam skema 2 dan 3 dapat dipakai sebagai acuan pengembangan kurikulum, apakah penyusunan

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

kurikulum muatan lokal di Sumatera Barat dan daerah lain di Indonesia sudah sesuai dengan acuan teori yang berlaku?

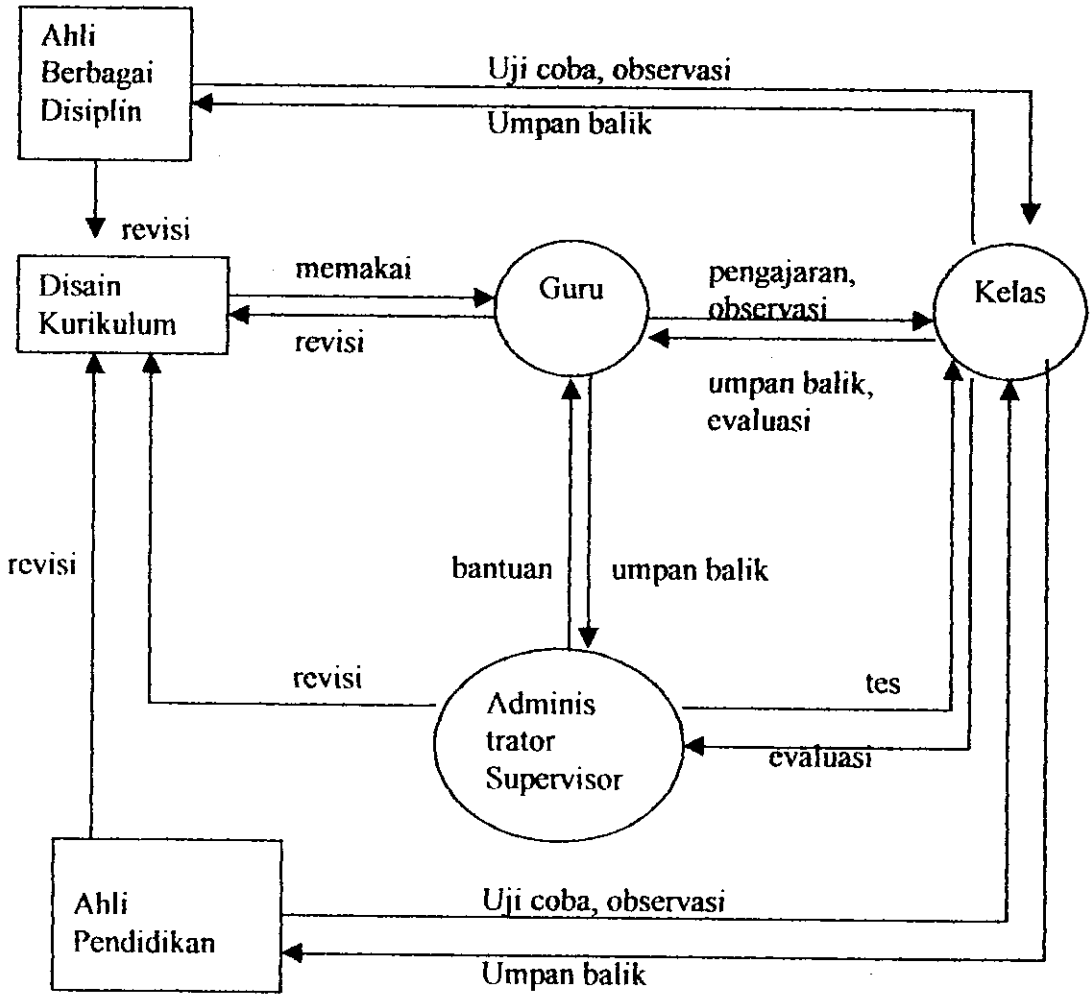

SKEMA 3. PERENCANAAN DAN PENERAPAN KURIKULUM BARU
(Sumber : Adaptasi Michaelis, Grossman dan Scott, 1975 : 463)

d. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di Sumatera Barat

Menurut rekaman sejarah yang pernah dicatat, pada awal tahun 1992 Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan (Pusbangkurandik), Balitbang-Depdikbud mendidik 35 orang guru dari berbagai latar belakang pendidikan dan jenjang sekolah tempat mereka bertugas, serta penilik SD dan Pengawas sekolah menengah untuk mengikuti program latihan pengembangan kurikulum dan memberikan pengalaman lapangan selama hampir satu tahun. Kelompok yang

beranggotakan 35 orang inilah yang kemudian dipopulerkan dengan nama Kelompok Perekayasa Kurikulum (KPK) (Syamsir Alam, 1993:3).

Kelompok Perekayasa Kurikulum (KPK) ini sebagian besar terdiri dari sarjana pendidikan berbagai disiplin ilmu yang memberi isi kepada kurikulum muatan lokal. Dengan kata lain penanggung jawab substansi atau isi kurikulum muatan lokal berada di pundak kelompok ini. Disamping itu dalam kelompok ini terdapat beberapa orang sarjana pendidikan yang berasal dari jurusan/program studi pengembangan kurikulum. Mereka ini dapat dianggap sebagai penanggung jawab kerangka disain atau yang mengatur skenario pengembangan kurikulum muatan lokal.

Dalam laporan Syamsir Alam di atas, dapat dibaca bahwa dalam perekayasaan kurikulum muatan lokal ini dilibatkan pula penilik SD, pengawas SM dan guru-guru, termasuk yang berstatus kepala SD. Memperhatikan anggota-anggota KPK ini, tampaknya berbagai pihak yang pantas dan berwenang sudah terlibat dan secara teoretis dapat diakui keabsahannya.

Lebih lanjut Syamsir Alam (1993:4) melaporkan bahwa dalam perekayasaan kurikulum muatan lokal ini telah ditempuh prosedur yang dilazimkan dengan bimbingan dari Pusbangkurandik, Balitbang Depdikbud. Pada tahap awal KPK diterjunkan ke daerah-daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya dan ibu kota propinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 1992 dengan menggunakan berbagai teknik identifikasi yang cocok dan kemudian dianalisis.

Pada tanggal 15-17 Februari 1993 diadakan seminar pengembangan kurikulum muatan lokal yang dihadiri oleh Pusbangkurandik dan berbagai lembaga, terbanyak dari unsur Perguruan Tinggi untuk menyepakati identifikasi kebutuhan daerah Propinsi Sumatera Barat yang akan dituangkan dalam kurikulum muatan lokal. Hasil seminar ini mengidentifikasi 5 mata pelajaran yang perlu diberikan ditingkat pendidikan dasar, yaitu (1) Baca tulis Al-Qur'an, (2) Baca tulis huruf Arab Melayu, (3) Budaya Alam Minangkabau, (4) Keterampilan Tradisional Minangkabau dan (5) Keterampilan Tradisional Minangkabau dan (5) Keterampilan Pertanian.

Penyusunan draft kelima mata pelajaran ini telah mengalami tujuh kali bongkar pasang di bawah bimbingan teknis dari Pusbangkurandik Balitbang Depdikbud

Jakarta. Editing terakhir dalam draft itu hanya menyangkut penyempurnaan bahasa dan EYD. Untuk memantapkan draft kurikulum muatan lokal yang sudah mengalami berkali-kali penyempurnaan ini, diadakan lagi "Seminar Pemantapan Materi Kurikulum Muatan Lokal" Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 11-14 Januari 1994. Dalam kesempatan itu diundang pula para Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat.

Penulis makalah ini diundang mewakili Rektor IKIP Padang yang ditugasi untuk memberikan masukan dalam seminar itu. Semua saran pemikiran telah dihimpun oleh KPK dalam seminar itu. Mana saran yang baik dan pemikiran yang relevan dimasukkan dalam kurikulum Muatan Lokal, sebelum diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat. Sekarang kurikulum itu secara bertahap telah dilaksanakan di tingkat pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kembali kepada pertanyaan di atas, maka dapat disimpulkan proses pengembangan kurikulum muatan lokal Sumatera Barat sudah sesuai dengan kerangka berfikir teoretis pengembangan kurikulum.

2. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Dalam USPN No. 2 Tahun 1989 Bab II pasal 4 ditegaskan bahwa : Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU RI No. 2 tahun 1989:4; garis oleh penulis).

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ini, setiap jenjang dan satuan pendidikan di negara Republik Indonesia ini dalam menyusun tujuan pendidikan selalu berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional. Untuk jenjang pendidikan dasar tujuannya telah ditetapkan dalam PP No. 28 tahun 1990, yaitu : Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik

untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (PP No. 28 tahun 1990, pasal 3).

Pendidikan Dasar yang diselenggarakan di Sekolah Dasar (SD) bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar "Baca-Tulis-Hitung", pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

Pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah (Depdikbud 1993:3).

Bila dibandingkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar terdapat pertalian yang sangat erat, yaitu sesuai dengan tingkat pendidikan dasar, maka tujuannya hanya memberikan bekal kemampuan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum muatan lokal ditetapkan untuk diberikan pada tingkat pendidikan dasar. Menurut Pedoman Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, tujuan kurikulum muatan lokal ditegaskan sebagai berikut :

1) Memperkenalkan siswa kepada lingkungan, ikut melestarikan budaya daerahnya, termasuk kerajinan, keterampilan yang dijunjung tinggi terutama yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi di daerah tersebut.
2) Memberikan bekal kemampuan dan keterampilan kepada siswa yang kelak dapat menjadi bekal untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3) Memberikan bekal untuk siswa agar dapat menolong dirinya sendiri dan membantu orang tuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Pusbangkurandik, 1989:3, garis oleh penulis).

Bila disimak dengan teliti, antara tujuan pendidikan dasar dan tujuan kurikulum muatan lokal (yang berada dalam tingkat pendidikan dasar) terdapat keterkaitan yang padu, yaitu sama-sama memberikan bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Apa kaitan tujuan pendidikan dasar dengan tujuan kurikulum muatan lokal propinsi Sumatera Barat. Untuk maksud ini ada baiknya disimak maksud dan tujuan kurikulum muatan lokalnya sebagai berikut :

> Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah, yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri. Proses pelestarian lingkungan alam, budaya dan keterampilan melalui pendidikan di sekolah perlu diawali dengan pengenalan, pemahaman, penguasaan dan penerapan sampai pembentukan etos kerja. Dengan demikian tujuan kurikulum muatan lokal adalah:
> 1. Memperkenalkan peserta didik pada lingkungannya sendiri, ikut melestarikan budaya daerahnya termasuk kerajinan, keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi di daerahnya.
> 2. Memberikan bekal kemampuan dan keterampilan untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menolong diri sendiri dan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Kanwil Dikbud, 1993:1-2)

Berdasarkan kutipan di atas dapat dinyatakan bahwa antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar sangat berkaitan erat dengan tujuan kurikulum muatan lokal di Sumatera Barat. Dengan perkataan lain, tujuan kurikulum muatan lokal seperti tersurat di atas dan dalam landasan program kurikulum muatan lokal Propinsi Sumatera Barat adalah aplikasi tujuan pendidikan nasional di daerah dalam rangka usaha mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

3. KONTRIBUSI KURIKULUM MUATAN LOKAL DALAM MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Untuk mengetahui kontribusi suatu kurikulum terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, kita perlu memperhatikan kurikulum sebagai suatu sistem yang mengandung empat komponen yang saling tergantung dan menentukan. Keempat komponen kurikulum itu ialah (1) tujuan, (2) isi/materi mata pelajaran, (3) metode dan organisasi, dan (4) evaluasi. Saling ketergantungan diatara keempat komponen tersebut dapat dilihat pada skema 4.

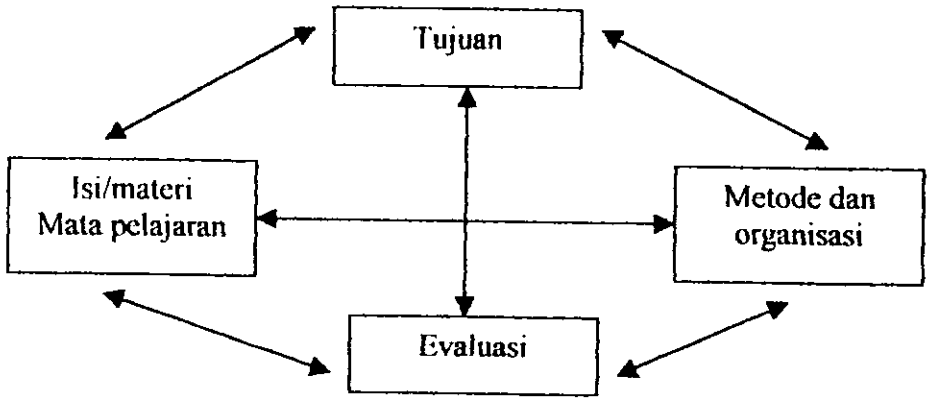

SKEMA 4. SALING HUBUNGAN ANTARA KOMPONEN-KOMPONEN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Sumber : Mohd. Ansyar dan Nurtain, 1992:20

a. Tujuan

Pembahasan tujuan dalam komponen kurikulum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tujuan kurikulum pada umumnya. Dalam hal ini tujuan kurikulum muatan lokal berkaitan erat dengan tujuan pendidikan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Bentuk kaitan ketiga tujuan itu bersifat mendukung, artinya tujuan kurikulum muatan lokal mendukung pencapaian tujuan pendidikan dasar dan tercapainya tujuan pendidikan dasar mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

b. Isi/Materi Pelajaran

Pengembangan isi/materi pelajaran akan lebih mudah, bila tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan kurikulum muatan lokal telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan tujuan pembelajaran memberikan gambaran kepada isi/materi pelajaran. Semakin lebih spesifik tujuan pembelajaran semakin jelas isi/materi pelajaran. Tujuan pembelajaran terdapat pada GBPP setiap mata pelajaran kurikulum muatan lokal. Dengan kata lain materi pelajaran yang jelas akan menyumbang kepada pencapaian tujuan pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran akan menyumbang pada pencapaian tujuan kurikulum muatan lokal dan demikian selanjutnya sampai kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

c. Metode dan Organisasi

Komponen metode dan organisasi ini berhubungan dengan bagaimana isi/materi pelajaran disajikan dan diorganisasikan, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pemilihan metode dan organisasi materi pelajaran yang digunakan diarahkan pada pencapaian tujuan instruksional dan tujuan kurikulum muatan lokal yang telah dibahas diatas. Dalam hal ini metode yang dipilih dan bentuk organisasi materi pelajaran yang dipakai disesuaikan dengan tuntutan materi/isi setiap mata pelajaran kurikulum muatan lokal.

d. Evaluasi

Komponen evaluasi berhubungan dengan upaya menemukan informasi dan bukti, apakah semua materi yang direncanakan dan yang telah diajarkan sudah mencapai tujuan atau tidak. Di samping itu evaluasi bermanfaat untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan itu sudah benar atau perlu direvisi. Evaluasi dapat pula dipakai untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan tingkat kecerdasan peserta didik, dan kesesuaian antara metode mengajar dengan tujuan pengajaran (Saylor dan Alexander, 1974). Pendek kata evaluasi berfungsi untuk

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

mengidentifikasi kekuatan kurikulum muatan lokal yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan dasar dan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian keempat komponen kurikulum muatan lokal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kurikulum muatan lokal akan membei kontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan dasar, dan tercapainya tujuan pendidikan dasar akan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

4. KONTRIBUSI KURIKULUM MUATAN LOKAL DALAM MENCERDASKAN KEHIDUDPAN BANGSA

Apakah ada kontribusi masing-masing mata pelajaran muatan lokal (Baca Tulis Al Qur'an, Baca tulis Huruf Arab Melayu, Budaya Alam Minangkabau, Keterampilan Tradisional Minangkabau dan Keterampilan Pertanian) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat ditelusuri lagi pada kontribusi kurikulum muatan lokal terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam butir 3 telah disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kurikulum muatan lokal memberi kontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan dasar dan pencapaian tujuan pendidikan dasar memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Justifikasi dan analisis secara teoretik yang didukung oleh undang-undang dan sumber informasi lainnya dapat dikatakan bahwa jika tujuan pembelajaran (lima mata pelajaran kurikulum muatan lokal) memberi kontribusi kepada pencapaian tujuan kurikulum muatan lokal, dan tercapainya tujuan kurikulum muatan lokal memberi kontribusi kepada pencapaian tujuan pendidikan dasar, dan tercapainya tujuan pendidikan dasar memberi kontribusi kepada tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka pencapaian tujuan kurikulum muatan lokal dapat dipastikan berkontribusi kepada usaha mencerdaskan kehidudpan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional.

Sekarang mari kita perhatikan hubungan antara tujuan kurikulum muatan lokal dengan tujuan pembelajaran umum masing-masing mata pelajaran kurikulum muatan lokal. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dicantumkan tujuan pembelajaran umum masing-masing mata pelajarannya sebagai berikut :

a) Mata pelajaran Baca Tulis Al Qur'an bertujuan untuk membekali dan meningkatkan kemampuan siswa membaca Al Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan menumbuhkan kegemaran membaca Al Qur'an menurut kaidah Ilmu Tajwid.

b) Mata pelajaran Baca Tulis Huruf Arab Melayu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca dan menulis tulisan Arab Melayu, dan mempelajari seni tulisan Arab indah (kaligrafi).

c) Mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau bertujuan agar siswa mengenal, memahami, menghayati, mengapresiasi dan menerapkan nilai-nilai budaya alam Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari.

d) Mata pelajaran Keterampilan Tradisional Minangkabau bertujuan mengembangkan sikap dan kemampuan siswa untuk mampu berkreasi dan menghargai kerajinan tradisional Minangkabau.

e) Mata pelajaran Keterampilan Pertanian bertujuan membekali siswa dengan keterampilan pertanian dan peternakan yang berguna dalam kehidupan, untuk membantu dirinya sendiri, orang tua dan masyarakat serta untuk mengembangkan minat siswa yang akan memungkinkan mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Kanwil Depdikbud, 1993:2; garis oleh penulis).

Bila diperhatikan semua tujuan pembelajaran umum mata pelajaran kurikulum muatan lokal yang menjadi pendukung tujuan kurikulum muatan lokal, tujuan pendidikan dasar dan tujuan pendidikan nasional, maka tidak dapat disangsikan lagi, bahwa mata pelajaran muatan lokal yang diberikan kepada peserta didik pendidikan dasar Sumatera Barat memberikan kontribusi kepada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. MAGANG DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH

Konsep magang telah mulai dikenal dalam dunia pendidikan kita, tetapi penerapan magang sebagai jembatan antara lingkungan sekolah dengan dunia usaha dan industri baru muncul dalam dasawarsa yang lalu. Konsep magang erat hubungannya dengan konsep relevansi pada tahun 1980an, yaitu kesesuaian mutu lulusan sekolah dengan kebutuhan lapangan kerja dan dunia industri. Upaya untuk mengaitkan dan

menjodohkan mutu lulusan pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja dan dunia industri, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan istilah "link and match" (terkait dan sepadan).

Konsep "link and match" ini adalah suatu terobosan baru dari Depdikbud untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian profesional menjadi terpadu dan sistematik antara pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan praktek magang di dunia usaha dan industri. Dengan perkataan lain, lebih seperdua waktu belajar siswa dihabiskan di sekolah, sisanya digunakan untuk berlatih kecakapan baru di unit usaha industri.

Praktek magang ini akan banyak dialami oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mempraktekkan teori yang dipetik di bangku sekolah pada unit industri. Pelaksanaan magang itu sekaligus memberi bekal keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Di luar negeri, khususnya di Jerman, pendidikan sistem magang ini disebut "dual system" (pendidikan sistem ganda atau PSG). Kelihatannya SMK kita akan mengarah pada Pendidikan Sistem Ganda (PSG) ini. (Republika, 7 Mei '95 hal. 2). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro telah meninjau pelaksanaan PSG ini tahun 1993 yang lalu. Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja Drs. A. Latief yang mengurusi tenaga kerja telah mempelajari PSG ini ke Jerman untuk mencari kemungkinan penerapannya di Indonesia. Sistem mana yang akan dipakai,--Pendidikan Sistem Magang (PSM) atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG),--keduanya bertujuan sama, yaitu menghasilkan tenaga ahli profesional yang handal. Tetapi dalam makalah ini akan dipakai istilah magang saja.

Sebagai langkah awal untuk uji coba, Direktorat Pendidikan Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdikbud telah menunjuk 7 (tujuh) buah SMK di Jakarta, Bekasi dan Bogor sebagai peserta magang di industri. Ketujuh SMK ini sudah mulai praktek magang sejak bulan Februari tahun 1993 yang lalu pada PT. Bukaka Teknik Utama Jakarta. Sampai sekarang sudah terlaksana sebanyak 5 (lima) angkatan. Angakatan I s.d IV berlangsung 3 (tiga) bulan dan angkatan V ditetapkan menjadi 6 (enam) bulan. (Republika, 7 Mei '95, hal.2).

UNIV. NEGERI PADANG

719/K/2001-k1/2

6. ETOS KERJA DAN DISIPLIN BELAJAR DIBENTUK DALAM PRAKTEK MAGANG

Pelaksanaan magang bagi siswa SMK di bidang industri baik yang bersifat teknik maupun jasa akan membentuk kebiasaan bekerja di dunia nyata. Berbagai mata pelajaran yang diikuti siswa di sekolah akan menambah ilmu pengetahuan teori lebih banyak dibanding pengetahuan praktek. Sebagian besar pengetahuan teori yang diperoleh siswa akan menimbulkan sikap ingin tahu mereka. Memang sikap ingin tahu inilah yang mendorong siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kalau sikap ingin tahu ini sudah berkembang menjadi kebiasaan belajar secara teratur, baik untuk pengetahuan teori maupun pengetahuan praktek, maka sudah dapat diramalkan akan berkembang menjadi kebiasaan mengatur waktu belajar sesuai dengan yang ditetapkannya. Hal ini sangat logis dapat menciptakan disiplin belajar yang tinggi.

Memang sistem pembelajaran di sekolah dirancang demikian rupa untuk meningkatkan disiplin belajar para siswanya. Pelajaran praktek di SMK dimaksudkan untuk melatih siswa terbiasa bekerja sesuai dengan rencana pelajaran dalam GBPP. Tetapi pelatihan yang dilakukan di labor dan bengkel kerja SMK, belum memadai karena kekurangan bahan dan alat. Jadi dapat dipahami, bila lulusan SMK belum siap pakai, karena mereka belum berpraktek dalam kerja nyata di bidang industri, baik industri teknik maupun industri jasa.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa praktek magang siswa di bidang industri inilah yang akan mematangkan mereka bekerja dalam dunia nyata. Praktek magang di bidang industri menuntut ketekunan dan keuletan siswa bekerja sesuai dengan acuan kerja dalam dunia industri. Sebab kekeliruan memakai alat dan menggunakan bahan akan berakibat fatal bagi yang bersangkutan dan kerugian di pihak industri. Jadi disiplin kerja dan disiplin belajar harus dipatuhi, demi menjaga kelancaran produktivitas dan efektivitas industri yang bersangkutan.

Apabila disiplin kerja dan belajar sudah ditaati, mudah diramalkan akan membentuk kebiasaan-kebiasaan bekerja dan belajar secara teratur. Pepatah Inggris mengatakan bahwa "Mind is ruled by habit throughout," artinya Pikiran diperintah oleh kebiasaan manusia saban hari. Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa

kebiasaan-kebiasaan bekerja dan belajar secara teratur inilah, menurut teori psikologi Conditioning akan membentuk etos kerja dan disiplin belajar yang tinggi.

7. KONTRIBUSI MAGANG DALAM MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN

Praktek magang yang dilaksanakan dengan disiplin kerja dan disiplin belajar secara teratur dapat membentuk kebiasaan bekerja dan belajar yang tinggi. Pengalaman selama bekerja dan belajar dalam situasi nyata di lapangan industri akan memberikan penghayatan dan kesadaran yang mendalam pada siswa peserta magang. Mereka mengetahui teknik menggunakan alat dan memahami pula teknik memakai bahan. Dalam praktek magang siswa harus mengetahui sejak dini kapan sesuatu dimulai dan harus diakhiri. Apa bahan yang akan digunakan, bagaimana bahan itu digunakan dan kapan bahan itu dipakai harus dipahami tiap siswa. Demikian juga dengan pemakaian alat, harus diketahui apa alat yang dipakai, bagaimana memakai alat itu dan kapan alat itu dapat digunakan.

Prosedur dan langkah inilah yang harus dihayati dan disadari oleh tiap siswa dalam praktek magang. Tanpa penguasaan prosedur dan langkah kerja ini para siswa tidak akan mampu mengujudkan cita-citanya sebagai tenaga ahli profesional di kemudian hari. Sebaliknya bila siswa dengan penuh perhatian dan kesadaran yang tinggi menempa diri bekerja dan belajar dalam praktek magang di unit industri, Insya Allah, mereka akan mampu menguasai lika-liku kerja dan belajar di dunia industri. Penguasaan prosedur dan langkah serta lika-liku kerja dalam dunia industri dapat menimbulkan sikap kerja keras yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya kemandirian dalam berusaha. Sesungguhnya yang dituntut oleh tujuan pendidikan nasional Indonesia, salah satu diantaranya ialah mandiri, artinya setelah lulus dari bangku pendidikan SMK, para siswa mampu mandiri menciptakan lapangan kerja. Dapat pula disimpulkan bahwa praktek magang seperti dipaparkan di atas akan memberi kontribusi yang signifikan terhadap kemandirian siswa.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di muka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tidak benar anggapan kurikulum muatan lokal memerosotkan kualitas kehiduapan

bangsa, karena muatan lokal tidaklah hanya memberikan bahan lokal yang klasik, tetapi lebih luas dan fleksibel lagi, yaitu muatan lokal dapat berisi ilmu pengetahuan mutakhir dan modern yang dibutuhkan oleh pembangunan suatu daerah untuk lebih maju.

Hal ini semuanya tergantung pada para pakar, ahli, cendekiawan, ulama dan pemerintah daerah setempat guna memikirkan muatan lokal apa yang patut dan mungkin dilaksanakan didaerahnya. Dengan demikian setiap daerah boleh berpacu mengungguli daerah lain dengan program muatan lokalnya. Penerapan muatan lokal demikian akan mampu menghasilkan lulusan pendidikan dasar yang terampil sehingga memberikan kontribusi nilai ekonomi di daerahnya.

Begitu juga dengan praktek magang yang dikelola dengan baik antara aparat dalam Depdikbud dengan aparat dilingkungan industri teknik dan industri jasa akan dapat meningkatkan nalar dan kesadaran siswa bekerja mandiri setelah lulus pendidikan. Masalahnya sekarang, bagaimana mengukuhkan praktek magang ini menjadi kenyataan, dalam situasi pendidikan dan tenaga kerja yang memprihatinkan.

Agaknya tidak diragukan lagi dan sudah semakin mendesak, kebutuhan koordinasi antara Depdikbud, Depnaker, Depdagri, Depag dan Kadin serta dunia industri untuk mencari terobosan baru bagi terlaksananya praktek magang ini. Tentu saja diperlukan undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan untuk mengikat semua pihak supaya koordinasi permagangan ini benar-benar terujud. Dengan demikian penerapan praktek magang yang benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan kerja akan menciptakan kontribusi nilai tambah bagi pribadi lulusan yang mandiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ansyar, Mohd. Dan Nurtain, 1992. Pengembangan Inovasi Kurikulum. Jakarta : P2LPTK Depdikbud.

Alam, Syamsir, 1993. "Pengantar Umum Pemantapan Materi" Makalah pada Seminar Pemantapan Materi Kurikulum Muatan Lokal Propinsi Sumatera Barat. 11-14 Januari 1994.

Depdikbud, 1993. Kurikulum Pendidikan Dasar, Landasan Program dan Pengembangan. Jakarta : Depdikbud.

Michaelis, John U, Ruth H. Grossman and Lloyd F. Scott, 1975. New Design for Elementary Curriculum and Instruction. New York : Mc. Graw Hill Book Company.

Nurgiyantoro, Burhan, 1985. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

"PSG Membentuk Etos Kerja dan Disiplin Belajar", 1995. Republika, 7 Mei : 2.

Pusbangkurandik, Balitbang Depdikbud, 1989. Pedoman Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, Jakarta : Depdikbud.

Saylor, J. Galen and William M. Alexander, 1974. Planning Curriculum for School. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Shepherd, Gene D. and William B. Ragan, 1982. Modern Elementary Curriculum. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989. Jakarta : Sinar Grafika.

Kanwil Depdikbud, Prop. Sumatera Barat, 1993. Landasan, Program Kurikulum Muatan Lokal. Padang : Kanwil Depdikbud.

----------, 1993. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal. Padang : Kanwil Depdikbud.

Kepmendikbud, No. 060/U/1993, tentang "Kurikulum Pendidikan Dasar," tanggal 25 Februari 1993.